

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENERTIBAN PROSTITUSI DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Sharon Nitami Marreta
(e-mail: sharontkj@gmail.com)
Pembimbing: Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi-Prodi Administrasi Publik-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jln. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Sharon Nitami Marreta, 1301155804 Effectiveness of Prostitution Control in Pekanbaru City. Supervisor: Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si.

Among the many social problems that occur in Indonesian society is the activity of prostitution. The problem of prostitution is a complicated matter, many things are related there, therefore this issue really needs special attention from the government. Dikota Pekanbaru prostitution problem has existed since a long time, since there are many places of entertainment, be it cafe-cafe, dim store, massage parlor and some are hung on the sidewalks or shops that are considered safe to conduct transactions Their sex. Efforts of Pekanbaru municipal government and security apparatus and related institutions in dealing with the practice of prostitution is continuously conducted in efforts to suppress and overcome the number of women who work as commercial sex workers in the city of Pekanbaru.

This study aims to determine the effectiveness of Procedure Control Procedures in Pekanbaru City. The theory used in this study is the theory according to Gibson about measuring the effectiveness of an activity. Informant in this research is Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru. The research method used is qualitative research. In the data collection, the researcher uses interview, observation, and documentation techniques based on Snowball Sampling.

The results of this study indicate that the effectiveness of the implementation of prostitution control in the city of Pekanbaru has not been implemented properly and optimally. In other words there are still many problems that arise in the implementation. Such as lack of facilities, careful planning, special programs are not written, and supervision system. This causes the control does not go as expected. The factors that influence the implementation of prostitution control are, among others, lack of human resources, budget, facilities, and community participation. It has a very important influence on the effectiveness of the implementation of prostitution control in the city of Pekanbaru.

Keywords: Effectiveness, Implementation, Control

PENDAHULUAN

Di daerah perkotaan permasalahan yang ditimbulkan masyarakat menjadi hal yang harus dicarai solusinya. Di antara masalah sosial yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia adalah kegiatan prostitusi. Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, banyak hal yang berhubungan disana oleh karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus dari pemerintah. Prostitusi merupakan problematika sepanjang zaman. Ia bukanlah masalah baru kehidupan dunia, akan tetapi kegiatan prostitusi ini telah membumi dan selalu hadir dari zaman ke zaman dalam paradigma yang berbeda.

Dikota Pekanbaru masalah pelacuran sudah ada sejak lama, sejak terdapat banyak tempat-tempat hiburan, baik itu cafe-cafe, warung remang-remang, panti pijat dan ada pula yang mangkal di pinggir-pinggir jalan ataupun pertokoan-pertokoan yang dianggap aman untuk melakukan transaksi seks mereka. Upaya pemerintah kota Pekanbaru dan aparat keamanan serta instansi terkait dalam menyikapi praktek pelacuran ini terus dilakukan dalam upaya penekanan serta penanggulangan jumlah masyarakat yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di kota Pekanbaru.

Usaha preventif dan represif oleh pemerintah telah dilakukan sebagai upaya mencegah atau menghambat perkembangan pekerja seks komersial semaksimal mungkin, karena dalam kenyataannya ditengah-tengah masyarakat praktek pelacuran dapat menimbulkan akibat negatif. Tidak terkecuali dengan diterbitkan peraturan pemerintah daerah

mengenai larangan kegiatan prostitusi di wilayah pekanbaru khususnya salah satunya adalah dengan mengeluarkan peraturan daerah No. 05 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum dan untuk memperkuat kebijakan maka pemerintah menerbitkan lagi peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Ketika suatu peraturan telah ditetapkan maka sebaiknya harus diikuti dengan tindakan. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai implementer kebijakan di Kota Pekanbaru. Adapun tugas dari instansi ini adalah sebagai fasilitator dan penggerak dimana mereka memiliki peran yang sangat penting dalam penertiban prostitusi di kota Pekanbaru. Hal ini terjadi karena kurangnya tindakan dari pihak terkait dalam melakukan penertiban serta rendahnya partisipasi masyarakat untuk mematuhi peraturan menjadi faktor pendukung permasalahan. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap aturan yang berlaku ataupun pura-pura tidak tahu akan ketentuan peruntukan jalan.

Penertiban merupakan salah suatu bentuk tindakan yang dilakukan sebagai pengatur dalam suatu hal agar sesuai dengan yang diharapkan serta menciptakan suatu keadaan yang tertib. Dalam penertiban tidak hanya manusia saja yang menjadi objek penertiban tetapi infrastruktur seperti tersedianya rambu larangan yang dapat mendukung terlaksananya penertiban, serta personil-personil yang menangani penertiban tersebut agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dari fenomena yang penulis temukan dilapangan, penulis berharap dengan diadakannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta informasi bagi instansi terkait, untuk

mengetahui bagaimana efektivitas organisasi pada SatPol PP kota Pekanbaru dalam mengatasi masalah ini dan mengapa yang sering terjaring razia hanya PSK konvensional yang dalam artian lokasi-lokasi yang dirazia juga bukan lokasi-lokasi yang elit dan ternama. Dengan begitu peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENERTIBAN PROSTITUSI DI KOTA PEKANBARU”**

A. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan semakin hari tiada habisnya kegiatan prostitusi di kota Pekanbaru, maka adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan penertiban prostitusi di kota Pekanbaru?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penertiban prostitusi di kota Pekanbaru?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
 - a. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penertiban prostitusi di kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penertiban prostitusi di kota Pekanbaru.
2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai :

- a. Secara Teoritis
 - 1) Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan mengaplikasikan teori yang sudah didapatkan dalam perkuliahan serta menjadi tambahan ilmu tentang administrasi Publik khususnya dibidang efektivitas organisasi.
- b. Secara Praktik
 - 1) Penelitian ini akan memberikan input dan sebagai perbaikan dalam penanggulangan masalah penyakit sosial di negara ini.

C. Konsep Teori

1. Efektivitas

The Liang Gie (2000:24) juga mengemukakan efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan. Menurut **Siagian (2003:24)**, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya manusia, dana, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya. Sedangkan **Handoko (2001:7)** mengatakan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam kaitannya dengan optimalisasi tujuan efektivitas

itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuan yang layak dicapai yang satu sama yang lain saling berkaitan. Suatu efektivitas dilihat berdasarkan pencapaian hasil atau pencapaian dari suatu tujuan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil) dari suatu program atau kegiatan, yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Dalam teori sistem, suatu organisasi dipandang sebagai satu dari sejumlah elemen yang saling tergantung. Aliran input dan output merupakan titik awal dalam menggambarkan suatu organisasi. Dengan istilah yang sederhana, organisasi merupakan sumber daya (input) dari sistem yang lebih besar (lingkungan), memproses input dan mengembalikannya dalam bentuk yang telah diubah atau di output. **Ivancevich (2006:23).**

Kembali lagi dalam pengukuran efektivitas, menurut **Gibson dalam Tangkilisan (2005:141)** menyebutkan bahwa efektivitas dapat diukur dari berbagai hal, yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja
7. Sistem pengawasan pengendalian yang bersifat mendidik.

2. Organisasi

Organisasi merupakan suatu struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.

Menurut **Jati (2000:11)** organisasi adalah sistem kerjasama antar dua orang atau lebih, atau organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama, organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.

Menurut **Schein** dalam **Nawawi (2008:9)** organisasi adalah koordinasi kegiatan manusia yang direncanakan untuk maksud atau tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi serta serangkaian wewenang dan tanggung jawab.

Jati (2000:13) secara umum tujuan organisasi merupakan keadaan atau tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi di waktu yang akan datang melalui kegiatan organisasi. Untuk mencapai tujuan dalam organisasi, pelaku (orang) dalam organisasi diharapkan untuk mendesain ataupun mengatur organisasinya dengan matang agar organisasi

dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, demi berjalan baiknya sebuah organisasi perlu diperhatikan beberapa prinsip organisasi seperti berikut:

- a. Perumusan tujuan yang jelas, sebab tujuan organisasi berfungsi untuk pedoman kearah mana organisasi akan dibawa, landasan bagi organisasi tersebut, menentukan macam aktifitas yang akan dilakukan, menentukan program, prosedur dan beberapa hal terkait dengan koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi dan mekanisme.
- b. Pembagian tugas dan pekerjaan (*job description*).
- c. Delegasi kekuasaan yang berarti pemimpin organisasi itu dipilih secara mufakat dan harus diikuti dengan adanya pertanggung jawaban.
- d. Kesatuan perintah (*one of command*) dan tanggung jawab.
- e. Prinsip kepemimpinan, dalam konteks kontemporal dari prinsip ini yang paling mengemuka ke permukaan adalah prinsip kepemimpinan yang berupa prinsip kolektif-kolegial, yaitu prinsip kebersamaan, mau mendengarkan dan menyelaraskan diri dengan nilai-nilai dari seluruh komponen organisasi, khususnya pada kepengurusan organisasi.
- f. Tingkat pengawasan, dengan diadakannya sebuah

monitoring terhadap kinerja pelaku organisasi atau lebih familiar dengan sebutan oposisi.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan sebuah tempat bagi individu yang saling bekerjasama satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama. Didalam mencapai tujuan terdapat proses penyusunan atau pengaturan individu sesuai dengan tugas, wewenang, tanggungjawab serta pengorganisasian dalam hubungan manajemen dari pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya.

3. Manajemen

Dalam bahasa inggris manajemen berasal dari kata "*to manage*" yang dalam bahasa indonesia dapat berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina dan memimpin. Sama halnya dengan administrasi, kata manajemen juga berasal dari bahasa latin, yaitu dari asal kata *mantis* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. kata-kata itu digabungkan menjadi kata *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke dalam bahasa inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management*, dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen akhirnya, *management* diterjemahkan kedalam bahasa indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan

G. R Terry (2006:4) mendefinisikan manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya.

Manullang, (2008:3) Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen mengandung tiga pengertian yaitu pertama; manajemen sebagai proses, kedua ; manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan ketiga; manajemen sebagai salah satu seni dan sebagai suatu ilmu. Menurut pengertian yang pertama, yakni manajemen sebagai proses, berbeda-beda dengan definisi yang diberikan oleh para ahli. Dalam *Encyclopedia Of The Social Science* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Selanjutnya haiman mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

4. Pengawasan

Pengawasan secara umum diartikan suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu

bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah satu yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya. Dalam hal ini pengawasan merupakan suatu cara atau proses dalam menciptakan efektivitas pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh organisasi demi tercapainya tujuan organisasi tersebut.

Manullang (2008:172) mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan. Menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan adalah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut **Situmorang dan Juhir (1994:22)** maksud pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.

2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya masalah baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning* yaitu *standard*.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya, serta didasarkan atas hasil observasi yang dilakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan di lapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas berdasarkan hasil penelitian yaitu efektivitas pelaksanaan penertiban prostitusi di kota Pekanbaru. Lokasi penelitian ini akan di lakukan pada Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Tampan, data-data yang berkaitan akan di dapatkan dari SatPol PP kota Pekanbaru. Informan penelitian ini adalah kepala bidang operasi dan ketertiban masyarakat

SatPol PP kota Pekanbaru, PSK, serta masyarakat. Jenis dan sumber data pada penelitian ini ada data primer dan data sekunder, data primer di peroleh dari wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder di peroleh dari artikel-artikel, media massa serta foto-foto hasil observasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari permasalahan kegiatan prostitusi di kota Pekanbaru, Peraturan Daerah sangat di perlukan dalam menanggulangi kegiatan prostitusi ini. Peraturan Daerah mungkin tidak secara umum dapat mengakomodir kegiatan prostitusi ini yang terdapat di kota Pekanbaru

Agar lebih jelas untuk mengetahui sejauh mana penilaian terhadap kegiatan yang dikatakan efektif, terutama dalam pelaksanaan penertiban prostitusi di Kota Pekanbaru. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut Gibson agar suatu kegiatan pelaksanaan bisa dikatakan efektif, maka peneliti akan menjelaskan menggunakan indikator tersebut. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Tujuan merupakan hal yang paling utama dalam berbagai kegiatan yang ingin direncanakan. Tanpa adanya tujuan maka kita tidak akan dapat melakukan kegiatan apapun. Tujuan merupakan suatu landasan untuk menentukan suatu kebijakan, sikap, perencanaan kerja, serta untuk memberi pemahaman kepada struktur organisasi agar tujuan tersebut diketahui oleh semua pihak dalam organisasi.

Tidak hanya bertujuan untuk memberi pemahaman kepada pihak internal organisasi tetapi juga kepada pihak eksternal organisasi agar memahami apa maksud dari tujuan yang dicapai dan apa guna dari tujuan tersebut. Kejelasan tujuan yang dicapai dapat memberikan gambaran tindakan apa yang akan dilakukan suatu organisasi kedepannya. Pernyataan tersebut dipertegas oleh perda kota Pekanbaru No 05 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum dan tujuan yang hendak dicapai sudah tertuang dalam tupoksi SatPol PP.

Dalam melakukan penertiban prostitusi di kota Pekanbaru, sebelumnya ditetapkan aturan apa yang akan menjadi landasan dalam penertiban. Dalam hal ini SatPol PP sebelum beroperasi melakukan apel untuk menetapkan bentuk aturan apa saja yang akan ditertibkan. Selain itu, *leader* dalam operasi penertiban ini menentukan waktu penertiban, namun untuk lokasi penertiban *leader* tidak akan memberi tahu anggota pada saat apel, melainkan pada saat perjalanan menuju lokasi penertiban.

Faktor tidak profesional dan komitmen dalam melaksanakan tupoksi tersebut demi keuntungan pribadi, dalam hal ini adanya pihak-pihak dari SatPol PP kota Pekanbaru yang menyebarkan informasi ke lokasi penertiban merupakan salah satu faktor penghambat dari pencapaian tujuan, yang dimana merupakan faktor setelah dari ketetapan aturan yang sama. Sebaiknya dalam melakukan penertiban, pihak yang bertugas hendaknya mematuhi dan profesional akan aturan dan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Karena tujuan adalah dasar utama

dalam kegiatan selanjutnya, seperti program atau langkah serta bentuk pengawasan bagaimana yang akan dilakukan suatu organisasi.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Strategi merupakan hal yang mendukung dalam proses pencapaian tujuan. Dalam pencapaian tujuan yang dikehendaki seperti dalam melakukan penertiban maka diperlukannya strategi agar segala bentuk yang telah direncanakan dan diinginkan tidak sia-sia. Oleh karena itu perlu adanya strategi yang merupakan langkah dalam terwujudnya kebijakan.

Kejelasan strategi yang dibuat pihak terkait mengenai penertiban prostitusi ini sebagai ukuran untuk keberhasilan tujuan yang telah dibuat, yang mana dapat membantu kenyamanan dan keamanan ketertiban umum dan juga dapat memberikan pengetahuan sekaligus efek jera dari ketidakpatuhan masyarakat terutama untuk psk terhadap strategi yang telah dibuat dan terikat secara hukum. Pihak SatPol PP kota Pekanbaru melakukan bentuk strategi seperti penyamaran, menjaga informasi penertiban, serta adanya kebijakan yang mengatur untuk melakukan penertiban prostitusi tersebut.

Dibuatnya aturan ini dapat memberi acuan dan mempermudah petugas untuk melakukan penindakan apabila terjadinya pelanggaran. Dengan adanya strategi pencapaian tujuan ini sudah dikatakan adanya kejelasan dan tanggung jawab dari petugas yang menertibkan prostitusi ini. Kesimpulannya dengan adanya strategi ini diharapkan mampu mendukung dari tujuan awal

penertiban.

3. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap

Perumusan kebijakan yang mantap merupakan pondasi dalam segala bentuk tindakan. Kebijakan ditetapkan atas dasar kejadian yang diperkirakan memberikan dampak terhadap kehidupan manusia baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Sebelum dibentuknya suatu kebijakan maka diperlukan suatu bentuk analisis agar kebijakan nantinya yang akan diambil mampu memberikan pemecahan permasalahan yang sedang terjadi. Kedua hal ini saling mendukung agar apa yang diharapkan tercapai.

Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan. Artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha atau strategi dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan penertiban prostitusi dengan melakukan penyamaran, menjaga informasi penertiban agar tidak bocor, serta personil, pemerintah daerah merumuskan kebijakan-kebijakan dalam pertimbangan yang mana berdasarkan hukum dan serta sudah ditetapkan SOP (*Standart Operational Procedure*) yang menjadi acuan dalam penertiban prostitusi. Tidak hanya pemerintah daerah kota Pekanbaru yang menetapkan SOP berdasarkan UU yang berlaku. Tapi, seluruh Satuan Polisi Pamong Praja serta jajaran instansi yang terkait menggunakan standar yang sama dalam penertiban ini.

Untuk mencapai efektivitas serta kesesuaian langkah-langkah yang dilakukan dengan kebijakan dan guna mencapai tujuan penertiban

prostitusi. Pembuatan pedoman pengawasan yang digunakan secara teknis dilapangan menjadi hal pertama yang dilakukan oleh SatPol PP kota Pekanbaru ketika kebijakan tentang ketertiban umum yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tentang Ketertiban Umum serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial disahkan, SatPol PP langsung membuat pedoman berupa SOP dan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perencanaan yang matang

Perencanaan merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah organisasi dalam mensukseskan segala bentuk kegiatan. Organisasi tidak akan mencapai tujuan apabila tidak memiliki perencanaan yang jelas dan matang. Dengan adanya perencanaan yang baik maka segala bentuk kegiatan dari organisasi akan mendapatkan hasil yang maksimal sebagaimana yang telah diharapkan.

Merupakan acuan kerja setiap organisasi bila perencanaannya matang, maka pelaksanaan yang dilakukan memungkinkan lancarnya proses kerja yang efektif dan efisien mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk menjamin terciptanya lingkungan masyarakat yang tertib dan nyaman, diperlukan pembagian tugas serta koordinasi dari beberapa pihak yang berwenang.

Dalam hal ini SatPol PP kota pekanbaru bertugas melakukan penangkapan atau penertiban dilokasi serta membawa target tangkapan ke kantor untuk diamankan dan

pemeriksaan identitas, sedangkan pihak-pihak lainnya seperti Dinas Sosial yang memberikan pembinaan kepada target, selanjutnya pihak kepolisian yang berwenang menegakkan hukum. Penertiban prostitusi ini sangat berpengaruh untuk terciptanya kondisi dan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib. Untuk itu, Satpol PP dan pihak-pihak yang terkait terus melakukan koordinasi demi terciptanya penertiban prostitusi yang efektif.

5. Penyusunan program yang tepat

Program merupakan bagian yang tidak kalah penting dengan indikator lainnya dalam melakukan penertiban agar perencanaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Perencanaan yang baik perlu dibuatkan suatu program agar penertiban lebih fokus dilaksanakan dan lebih bernilai efektif. Pihak SatPol PP mengatakan tidak memiliki program khusus dalam penertiban prostitusi ini, hanya saja pihak SatPol PP melakukan kegiatan berdasarkan tupoksi saja.

Pihak SatPol PP kota Pekanbaru tidak memiliki program khusus dalam menangani penertiban prostitusi ini. Hanya saja program tersebut timbul dari keseharian tugas dan fungsi dari pihak SatPol PP itu sendiri. Padahal suatu perencanaan yang baik perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang lebih menjurus lagi sebab apabila tidak maka para pelaksana penertiban akan kurang memiliki pedoman dalam bertindak. Suatu kebijakan yang telah ditetapkan hendaknya memiliki program khusus agar tujuan yang direncanakan semula dapat lebih

fokus untuk ditangani dan dapat mencapai tujuan yang telah dibuat.

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja

Untuk meningkatkan kualitas dan *skill* yang mendukung proses penertiban prostitusi. SatPol PP kota Pekanbaru memberikan fasilitas kepada para petugas yang diturunkan dilapangan demi mempermudah akses dalam menjangkau lokasi yang telah ditentukan untuk dilakukan penertiban.

Pihak SatPol PP kota Pekanbaru telah memiliki kendaraan yang sesuai dengan standar dalam melakukan penertiban sehingga kegiatan penertiban yang dilakukan dapat berjalan maksimal. Dimana SatPol PP kota Pekanbaru memiliki jenis sarana yang berbeda-beda tergantung jenis kebutuhan penertiban.

Hal ini sudah menggambarkan bahwa setiap instansi telah memiliki sarana dan prasarana berupa pos untuk target tangkapan dikantor dan kendaraan patroli dalam pelaksanaan penertiban. Tetapi dengan tersedianya sarana dan prasarana tidak menjamin penertiban dapat dilakukan secara efektif, apalagi dengan minimnya jumlah fasilitas yang digunakan untuk menunjang lancarnya suatu kegiatan tersebut. Hal ini cukup membuktikan penulis sering temui bahwa masih banyak psk yang menjajakan dirinya di pinggir jalan, maupun di lokasi-lokasi yang berkedok panti pijat, salon dan tempat-tempat hiburan umum lainnya.

7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik

Pengawasan dan pengendalian merupakan salah satu bentuk kegiatan yang berguna untuk memastikan apakah pelaksanaan kebijakan berjalan dengan sebagaimana mestinya atau tidak, sesuai atau tidak dengan tugas yang telah diberikan. Pengawasan dalam manajemen merupakan suatu proses yang sangat penting karena suatu pekerjaan akan terasa berat jika dikerjakan sendiri sehingga membutuhkan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya. Selain itu manajemen merupakan suatu podoman pikiran dan tindakan untuk dapat mencapai tujuan yang teratur.

Pihak SatPol PP kota Pekanbaru telah memberikan tugas kepada anggotanya dalam melakukan penertiban. Tugas yang diberikan dalam bentuk arahan dan ketetapan beberapa anggota yang ditugaskan dengan pembagian tugas kepada masing-masing anggota yang turun ke lokasi penertiban dengan berpencar ke beberapa titik lokasi dan melakukan pengawasan dengan penyamaran oleh anggota *intel* dari SatPol PP kota Pekanbaru. Dengan demikian dapat meminimalisir bocornya informasi keluar.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penertiban Prostitusi di Kota Pekanbaru

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan observasi dan kegiatan wawancara maka dari itu penulis menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi penertiban. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan penertiban

yang dilakukan oleh SatPol PP kota Pekanbaru:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan, karena dalam mewujudkan suatu kegiatan dibutuhkan kejelasan suatu perintah, dan bagaimana bentuk penyampaian perintah atau arahan informasi. Tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, maka suatu kebijakan akan mengalami kesulitan dalam pencapaian tujuan. Selain sumber daya yang berupa jumlah personil pelaksana, dukungan fasilitas juga tidak kalah pentingnya, sebab dengan adanya pelimpahan wewenang pelaksana dapat melaksanakan tugas secara efektif.

2. Anggaran

Dalam setiap pelaksanaan kerja tidak terlepas dari yang namanya biaya atau dana begitu juga dengan pelaksanaan penertiban prostitusi. Dalam hal ini pihak SatPol PP memiliki dana khusus untuk melakukan penertiban, namun disamping itu tidak semua anggota yang melaksanakan penertiban turun ke lapangan mendapatkan honor khusus. Dalam artian gaji lembur untuk petugas yang turun kelapangan.

3. Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup sangat diperlukan dalam sebuah organisasi agar mempermudah tujuan organisasi bisa berjalan dengan efektif. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam bekerja, maka akan mempengaruhi kegiatan dan

produktivitas dari seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

4. Partisipasi Masyarakat

Peran serta masyarakat terutama masyarakat yang berada disekitar lokasi pelacuran tersebut juga sangat diperlukan di dalam penertiban pelacuran di kota Pekanbaru. Banyak masyarakat yang terkesan kurang menghiraukan himbauan atas kebijakan ini. Hal ini dapat kita lihat dari fenomena dimana ada anggota masyarakat yang mencari keuntungan dari pelacuran tersebut seperti dengan cara memberikan perlindungan terhadap pelacur.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti dari uraian bab sebelumnya mengenai Efektivitas Pelaksanaan Penertiban Prostitusi di Kota Pekanbaru, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penertiban prostitusi di kota Pekanbaru belum berjalan secara efektif. Karena banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Padahal didalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum, serta didukung dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial. Telah dijelaskan dan melarang bagi masyarakat yang berkemungkinan

mengganggu ketertiban umum. Dari tujuh indikator yang dikemukakan oleh Gibson kejelasan tujuannya tidak pada pokok dasar yang kuat, terlihat bahwa kebijakan pemerintah kota tidak jelas dan tidak tegas karena masih banyak kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan aturan yang ada. Terlihat dari kenyataan aturan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketetapan yang tertulis sehingga terkesan main-main atau tidak serius dalam pelaksanaannya. Ditambah hanya pemberitahuan secara lisan dan tidak dengan tulisan, dengan begitu membuat petugas tidak mendapatkan sanksi. Bentuk perencanaan masih dirasakan belum optimal, tidak adanya program khusus dalam menertibkan prostitusi. Program hanya mengikuti program-program operasi penertiban secara umum. Tidak memiliki suatu program maka penindakan tidak akan dapat fokus dilakukan karena tidak ada ketentuan yang mengikat. Sementara kasus prostitusi termasuk salah satu permasalahan yang tidak dapat terselesaikan dari tahun ketahunnya. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam penertiban, serta pengawasan masih belum berjalan dengan efektif dalam pelaksanaan penertiban prostitusi di kota

Pekanbaru. Tidak adanya pemberian sanksi tegas terhadap psk yang melanggar. Hal ini tidak menimbulkan efek jera terhadap penertiban.

2. Faktor yang menjadi penghambat dari proses penertiban yang dilakukan oleh SatPol PP kota Pekanbaru adalah sumber daya manusia yang tidak mencukupi dan sikap *loyalitas* terhadap tupoksi untuk melakukan pengawasan, sehingga penertiban sulit dilakukan. Tidak adanya anggaran khusus dalam melakukan penertiban, sehingga penertiban tidak berjalan optimal. Kurang memadainya jumlah sarana dan prasarana membuat pelaksanaan penertiban prostitusi kurang optimal. Serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap aturan yang berlaku menjadi hambatan dalam menciptakan ketertiban umum yang aman dan nyaman.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan, maka peneliti mengajukan dan memberikan saran yang sekiranya dianggap perlu untuk dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan mengenai efektivitas pelaksanaan penertiban prostitusi di kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam pencapaian tujuan dalam pelaksanaan adanya bentuk kesepakatan bersama yang mendasari mengapa prostitusi di kota Pekanbaru perlu di tanggulangi.
2. Adanya bentuk perencanaan dan sistem koordinasi yang lebih baik lagi termasuk dengan pihak-pihak yang terkait seperti Dinas Sosial yang merupakan penyedia jasa pembinaan para psk yang juga sebagai penentu keberhasilan penertiban ini.
3. Sebaiknya dibuat program khusus dan arahan yang tertulis dalam pelaksanaan penertiban sehingga petugas juga dapat lebih terarah untuk melaksanakan tugasnya karena telah didasari oleh aturan yang mengikat yang mengharuskan mereka untuk bekerja dengan optimal. Diharapkan pihak yang berwenang melakukan pengawasan yang ketat dan pemberian sanksi yang tegas terhadap target tangkapan.
4. Jika perlu dilakukan revisi Peraturan Daerah yang sifatnya lebih kuat dan tegas mengatur kebijakan ini agar masyarakat dan penegak hukum mentaati peraturan tersebut.
5. Instansi-instansi yang terkait digarapkan lebih bisa melakukan bentuk sosialisasi dengan cara melakukan pendekatan terhadap masyarakat agar proses penyampaian

informasi dan tujuan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Cetakan Kesembilanbelas. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Gibson, James L, dkk.2005. *Organisasi*. Erlangga: Jakarta.
- Gie, The Liang. 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta. Liberty
- Handoko, T, Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Hasibuan, H. Malayu. 2003. *Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Hasibuan, Melayu. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta:BPFE.
- Iman, Indra dan Siswandi. 2009. *Aplikasi Manajemen Perusahaan*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kartono, Kartini. 2015. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Koentjoro. 2004. *Tutur dari Sarang Pelacur*. Jakarta. Penerbit Tinta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2005. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Manullang. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Pasolong, Harbani 2005. *Administrasi public*. Bandung. Alfabeta.
- Pasolong, Harbani 2010. *TeoriAdministrasi public*. Bandung. Alfabeta.
- Sarwoto. 2010. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Siagian. 2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi Dan Strateginya*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Siagian. 2006. *FilsafatAdministrasi*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Siagian. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bum. Aksara.
- Silalahi, Ulbert. 2002. *Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen*. Bandung. Mandar Maju.
- Situmorang, Viktor M. dan Juhir, Jusuf. 1994. *Pengawasan*. Jakarta. Gunung.
- Steers, Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta. Erlangga.

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2006. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah, Kurniawan. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta. Kencana.
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi*. Jakarta. Citra Utama.
- Sutrisno, Edy (2010). *Budaya organisasi*. Jakarta. Kencana.
- Tangkilisan. H.N. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta. PT. Grafindo Persada.
- Tangkilisan. H.N. 2008. *Kebijakan Publik, Konsep, Strategi dan Kasus Kerja Lukman Offse*. Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
- Terry. R. Goerge. 2003. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Terry, G. R & Rue. W. Leslie. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. PT Bumi Aksara. Jakarta.

DOKUMEN:

- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang hiburan Umum.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor : 25 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.